

ABSTRAK

DETERMINASI ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS NOMOR : 10/PID.SUS- TPK/2021/PT. DKI).

Erva Yunita (2310622064), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

Penulisan penelitian ini mengangkat topik tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum dalam studi kasus Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI) yaitu seorang jaksa yang dalam hukumannya hakim memberikan vonis ringan dikarenakan aspek non yuridis yaitu seorang ibu yang mempunyai balita dan sedang menyusui. Padahal tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa atau disebut dengan *extraordinary crimes*. Perbuatan korupsi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Sehingga pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam Pasal 52 KUHP mengatur pemberatan pidana bagi pegawai negeri atau pejabat yang melakukan tindak pidana. Pemberatan pidana ini dapat berupa tambahan hukuman sepertiga dari hukuman pokok. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau library research, artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Pertimbangan aspek non yuridis lebih mendominasi pemangkasan vonis jelas tidak sejalan dengan prinsip dasar keadilan dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ditegakannya hukum pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi maka tujuan dari pemberantasan korupsi di Indonesia akan tercapai yaitu pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak dicontoh oleh orang lain.

Kata Kunci : Determinasi, Asas keadilan, Putusan Hakim, Aparat penegak hukum, dan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

*DETERMINATION OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE IN JUDGE'S
DECISIONS AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS WHO COMMIT
CORRUPTION CRIMES
(CASE STUDY RULING NO:10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)*

Erva Yunita (2310622064), Handoyo Prasetyo, Beniharmoni Harefa

This research paper raises the topic of a corruption case committed by a law enforcement officer in case study Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI), namely a prosecutor whose sentence was given by the judge due to non-juridical aspects, namely a mother who has a toddler and is breastfeeding. In fact, corruption is an extraordinary form of crime or is called an extraordinary crime. Corruption causes enormous state losses. So that corruption committed by law enforcement officers must be punished in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Even Article 52 of the Criminal Code regulates the aggravation of criminal penalties for civil servants or officials who commit crimes. This aggravation of criminal penalties can be in the form of additional additional penalties from the main sentence. The research method used is normative legal research or literature research, meaning that this research is based on literature sources to discuss the problems that have been formulated. The consideration of non-juridical aspects that dominate the sentence reduction is clearly not in line with the basic principles of justice and the goal of eradicating corruption. By enforcing criminal law for law enforcement officers who commit corruption, the goal of punishment will be achieved, namely that the perpetrators are deterred and do not repeat their actions and are not imitated by others.

Keywords: *Determination, Principle of Justice, Judge's Decision, Law Enforcement Officers, and Corruption*